

GUBERNUR SULBAR DAN KEPALA DAERAH SE-SULBAR LAKUKAN KOORDINASI PENCEGAHAN KORUPSI DI KPK



Penadigital.id

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama jajaran kepala daerah se-Sulbar melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada Kamis, 7 Agustus 2025. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut antara lain Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, Bupati Polewali Mandar Syamsul Mahmud, Bupati Majene Andi Achmad Sukri Tammalele, Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras, Bupati Mamasa Welem Sambolangi, dan Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus.

Selain itu, hadir pula Kepala Inspektorat Sulbar Muh. Natsir, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Ali Chandra, serta sejumlah pejabat lainnya. Muh. Natsir mengatakan bahwa mereka mendampingi Pak Gubernur dalam rangka koordinasi terkait upaya pencegahan korupsi di Sulbar. Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, KPK RI ingin mengetahui berbagai langkah konkret yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk tantangan yang dihadapi.

Ia melanjutkan bahwa Pak Gubernur menyampaikan secara rinci berbagai permasalahan serta lima upaya yang telah ditempuh. Lima upaya yang dipaparkan Gubernur Sulbar antara lain:

1. Identifikasi Rekam Jejak Pejabat: Dilakukan sebelum pelantikan 15 pejabat eselon II.
 2. Penandatanganan Pakta Integritas: Pejabat eselon II diwajibkan berkomitmen menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
 3. Retret dan Orientasi Pejabat: Agar memiliki pemahaman terhadap prosedur tata kelola pemerintahan yang baik.
 4. Pemutakhiran Temuan BPK: Menindaklanjuti temuan audit untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah.
 5. Penertiban Aset Daerah: Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas.
- Seluruh upaya tersebut dipaparkan secara detail di hadapan pimpinan KPK RI.

Natsir menutup dengan mengatakan bahwa ,elalui pertemuan ini, KPK ingin melihat sejauh mana komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar dalam upaya pencegahan korupsi.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/08/08/gubernur-sulbar-dan-kepala-daerah-se-sulbar-lakukan-koordinasi-pencegahan-korupsi-di-kpk/>, Gubernur Sulbar dan Kepala Daerah Se- Sulbar Lakukan Koordinasi Pencegahan Korupsi di KPK, 8 Agustus 2025;
2. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/08/08/cegahan-korupsi-suhardi-duka-pimpinan-dprd-dan-para-bupati-rakor-dengan-kpk/>, Cegahan Korupsi, Suhardi Duka, Pimpinan DPRD dan Para Bupati Rakor dengan KPK, 8 Agustus 2025;
3. <https://bugispos.com/upaya-pencegahan-korupsi-gubernur-suhardi-duka-kordinasi-ki-ke-kpk-ri/>, Upaya Pencegahan Korupsi, Gubernur Suhardi Duka Koordinasi ke KPK RI, 8 Agustus 2025;
4. <https://makassar.antarane.ws.com/berita/602177/gubernur-sulbar-koordinasi-dengan-kpk-cegah-korupsi>, Gubernur Sulbar koordinasi dengan KPK cegah korupsi, 9 Agustus 2025;
5. <https://www.ekspossulbar.co.id/2025/08/08/upaya-pencegahan-korupsi-gubernur-suhardi-duka-koordinasi-ke-kpk-ri/>, Upaya Pencegahan Korupsi, Gubernur Suhardi Duka Koordinasi ke KPK RI, 8 Agustus 2025;
6. <https://potretnusantara.co.id/2025/08/08/upaya-pencegahan-korupsi-gubernur-sulbar-suhardi-duka-koordinasi-ke-kpk-ri/>, Upaya Pencegahan Korupsi, Gubernur Sulbar Suhardi Duka Koordinasi ke KPK RI, 8 Agustus 2025;
7. <https://kabardesa.co.id/tag/upaya-pencegahan-korupsi/>, Upaya Pencegahan Korupsi, 8 Agustus 2025;
8. <https://maraya.news/berita/7604/gubernur-sdk-boyong-para-bupati-se-sulbar-ke-kpk>, Gubernur SDK Boyong Para Bupati Se Sulbar Ke KPK, 8 Agustus 2025;
9. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/08/08/upaya-pencegahan-korupsi-gubernur-sulbar-suhardi-duka-sambangi-kpk-ri>, Upaya Pencegahan Korupsi, Gubernur Sulbar Suhardi Duka Sambangi KPK RI, 8 Agustus 2025;
10. <https://wacana.info/berita/7428/gubernur-sulbar-bawa-para-bupati-sambangi-kpk>, Gubernur Sulbar Bawa Para Bupati Sambangi KPK, 8 Agustus 2025;
11. <https://rakyatta.co/boyong-para-bupati-gubernur-sulbar-lapor-ke-kpk-lima-jurus-tangkal-korupsi-dipaparkan-di-jakarta/>, Boyong Para Bupati, Gubernur Sulbar Lapor ke KPK! Lima Jurus Tangkal Korupsi Dipaparkan di Jakarta, 8 Agustus 2025;
12. <https://www.artikel.news/sulbar/baca/43089/bersama-gubernur-dan-bupati-se-sulbar-wabup-pasangkayu-hadiri-koordinasi-di-kpk>, Bersama Gubernur dan Bupati se-Sulbar, Wabup Pasangkayu Hadiri Koordinasi di KPK, 8 Agustus 2025;
13. <https://sekitarinfo.com/2025/08/08/gubernur-suhardi-duka-koordinasi-ke-kpk-ri-bahas-strategi-pencegahan-korupsi/>, Gubernur Suhardi Duka Koordinasi ke KPK RI, Bahas Strategi Pencegahan Korupsi, 8 Agustus 2025;

14. <https://swaramandar.com/gubernur-sulbar-suhardi-duka-paparkan-lima-strategi-cegah-korupsi-di-hadapan-kpk-ri/>, Gubernur Sulbar Suhardi Duka Paparkan Lima Strategi Cegah Korupsi di Hadapan KPK RI, 8 Agustus 2025.

Catatan:

1. Berdasarkan *Black Law Dictionary*, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain
2. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kita Undang-Undang Hukum Pidana, Jenis Korupsi ada 7 yaitu sebagai berikut:
 - a. Merugikan Keuangan Negara
 - Pasal 2
 - Pasal 3
 - b. Suap Menyuap
 - Pasal 5 ayat (1) huruf a
 - Pasal 5 ayat (1) huruf b
 - Pasal 13
 - Pasal 5 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf a
 - Pasal 12 huruf b
 - Pasal 11
 - Pasal 6 ayat (1) huruf a
 - Pasal 6 ayat (1) huruf b
 - Pasal 6 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf c
 - Pasal 12 huruf d
 - c. Penggelapan dalam jabatan
 - Pasal 8

- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c
- d. Pemerasan
 - Pasal 12 huruf e
 - Pasal 12 huruf g
 - Pasal 12 huruf h
- e. Kecurangan dalam bangunan
 - Pasal 7 ayat (1) huruf a
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d
 - Pasal 7 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf h
- f. Benturan kepentingan pengadaan
 - Pasal 12 huruf i
- g. Gratifikasi
 - Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
- 3. Selain definisi tindak pidana korupsi tersebut, masih ada tindak pidana korupsi lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
 - Pasal 21
 - b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
 - Pasal 22 jo. Pasal 28
 - c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
 - Pasal 22 jo. Pasal 29
 - d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan
 - Pasal 22 jo. Pasal 35
 - e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
 - Pasal 22 jo. Pasal 36
 - f. Saksi yang membuka identitas pelapor
 - Pasal 24 jo. Pasal 31